



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 47 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana

Q

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);

13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dengan sebutan lain Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Blitar.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang secara substantif RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja

2

Walikota terpilih setelah diselaraskan dengan arah kebijakan dan pokok-pokok program Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi (RPJMP).

9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA – SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja-PD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- (2) Renja-PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA – SKPD.

Pasal 3

- (1) Renja – PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I : Pendahuluan.
 - BAB II : Hasil Evaluasi Renja – PD Tahun Lalu.
 - BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.
 - BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.
 - BAB V : Penutup.
- (2) Rincian Renja – PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Renja-PD Tahun 2024 terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
2. Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2024;
3. Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
4. Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2024;
5. Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2024;
6. Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2024;
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2024;
8. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2024;
9. Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2024;
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar Tahun 2024;
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2024;
12. Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2024;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2024;
14. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2024;
15. Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2024;
16. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Kota Blitar Tahun 2024;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2024;
18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2024;
19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2024;
20. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2024;
21. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2024;
22. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2024;
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
24. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2024;
26. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2024;
27. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
28. Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2024;
29. Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2024;
30. Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2024.

2

Pasal 5

Dalam hal program dan kegiatan Renja – PD Tahun 2024 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berbeda dengan hasil pembahasan bersama DPRD, maka yang dipergunakan adalah program dan kegiatan hasil pembahasan bersama dengan DPRD.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 10 Agustus 2023
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

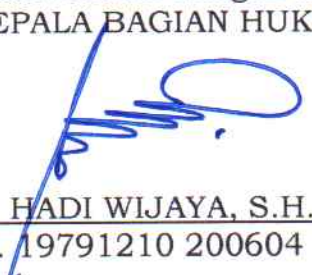
Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

17. RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Jenjang perencanaan daerah terdiri dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Ketentuan selanjutnya diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 273 (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan kedalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD. RKPD dimaksud memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah serta tindak lanjut terkait dengan proses penyusunan KUA PPAS Tahun 2024 dan RAPBD Tahun 2024.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 13 Ayat (2) Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Dalam pasal 16 Ayat (2) menyatakan Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan : a. Persiapan penyusunan; b. Penyusunan rancangan awal; c. Penyusunan rancangan; d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. Perumusan rancangan akhir; dan f. Penetapan. Dengan demikian, pernyataan tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan utama pada paragraf kedua supaya disempurnakan.

Berdasarkan Pasal 126 Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Setelah disusun berdasarkan tahapan dan tata cara, maka rancangan Renja Perangkat Daerah disempurnakan menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar tahun 2024 disusun dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan,

- kelompok sasaran, serta perkiraan maju;
2. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Disbudpar tahun 2023 yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan / atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Disbudpar dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Disbudpar;
 3. Memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi baik untuk tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025;
 4. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD 2024, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

1.1.1. Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Penyusunan renja salah satunya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu pasal 78 ayat 1 huruf (d) Permendagri nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Ini artinya antara Renja dan RKPD merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Renja berpedoman pada RKPD, sementara penyusunan Ranwal RKPD mencakup penelaahan terhadap Ranwal Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Disbudpar Kota Blitar Tahun 2024 berpedoman kepada RKPD Kota Blitar tahun 2024.

1.1.2. Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah

Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Renja perangkat Daerah juga berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam Permendagri nomor 87 Tahun 2017, disebutkan bahwa sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran Renja Perangkat Daerah, merupakan dasar penilaian system akuntabilitas kinerja instansi perangkat daerah. Ini artinya harus terdapat kesesuaian antara dokumen renstra dengan dokumen renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan renja Disbudpar Kota Blitar tahun 2024 juga berpedoman pada Rencana Strategis Disbudpar Kota Blitar Tahun 2021-2026

1.1.3. Keterkaitan antara Renja PD dengan Renja Kementerian/ Lembaga dan Renja Provinsi

Renja Kementerian/lembaga (Renja kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Parekraf/dan Renja Provinsi (Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur) tidak terkait secara langsung dalam proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, seperti halnya Renstra maupun RKPD. Namun Renja Kementerian dan Renja Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Jatim perlu ditelaah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana program provinsi dan pusat yang dapat berpengaruh langsung terhadap Renja Disbudpar Kota Blitar tahun 2024.

1.1.4. Renja dan Tindak lanjutnya dalam APBD

Renja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar tahun 2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Disbudpar Kota Blitar Tahun 2024. Sedangkan RKA Disbudpar Kota Blitar Tahun 2024 merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan sebagai dokumen APBD Kota Blitar. Oleh karena itu Renja merupakan salah satu dokumen penting untuk kemudian ditindaklanjuti dalam APBD Kota Blitar Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Renja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar tahun 2024 di susun berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6841);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
18. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Nomor 41 Tahun 2023 Seri E);
 26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
 27. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7); dan
 28. Peraturan Walikota Blitar No. 74 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 66 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2022 Nomor 74);
 29. Peraturan Walikota Blitar Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 21);
 30. Peraturan Walikota Blitar Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 71);
 31. Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Disusunnya Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata dimaksudkan untuk merumuskan rencana kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar untuk periode 1(satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

- Merupakan pedoman pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah
- Sebagai penjabaran Rencana Kerja pemerintah daerah kota Blitar Tahun 2024;
- Sebagai pedoman pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
- Sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar 2024 sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun lalu, berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar Tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar, Analisis kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar, review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

- BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, menguraikan mengenai Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar.
- BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar, menguraikan tentang program dan kegiatan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disertai dengan prakiraan maju tahun 2025.
- BAB V Penutup, menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar tahun 2023

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Guna memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Disbudpar Kota Blitar tahun 2023 dan prakiraan capaian tahun 2024 dengan mengacu pada APBD tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah.

Adapun program Disbudpar Kota Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2022 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kebudayaan
2. Program Pembinaan Sejarah
3. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
4. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
5. Program Pemasaran Pariwisata
6. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah :

1. Program Pengembangan Kebudayaan
2. Program Pembinaan Sejarah
3. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
4. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
5. Program Pemasaran Pariwisata
6. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra s/d tahun 2023
Kota Blitar

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan tahun 2022			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023	
								Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.2				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
2.2	0			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase budaya lokal yang dikembangkan	100%		60%	60%	100%	75%	75%	75%
2.2	0	2.0		Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan kebudayaan yang terfasilitasi	45 kelompok		9	9	100%	9 kelompok	18 kelompok	40%
2.2	0	2.0	0	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	5 Obyek					1 Obyek	1 Obyek	20%

2.2 2	0 2	2.0 1	0 2	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	40 orang					8 orang	8 orang	20%
2.2 2	0 2	2.0 2		Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelestarian kesenian tradisional yang terfasilitasi	47 event		8 event	8 event	100%	9 event	17 event	36%
2.2 2	0 2	2.0 2	0 2	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	47 laporan					9 laporan	9 laporan	100%
2.2 2	0 4			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase kesejarahan yang dikembangkan	90%		80%	80%	100%	80%	80%	80%
2.2 2	0 4	2.0 1		Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan event sejarah yang terfasilitasi	35 event		7 event	7 event	100%	7 event	14 event	40%
2.2 2	0 4	2.0 1	0 1	Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	30 event					6 event	6 event	20%
2.2 2	0 4	2.0 1	0 2	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	5 jenis					1 jenis	1 jenis	20%
2.2 2	0 5			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dikembangkan	70%		50%	50%	100%	60%	60%	60%

2.2 2	0 5	2.0 2		Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang dikelola	5 obyek		1 cagar	1 cagar	100%	1 obyek	1 obyek	20%
2.2 2	0 5	2.0 2	0 1	Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Obyek Cagar Budaya yang Dilindungi	5 obyek					1 obyek	1 obyek	20%
3.2 6	0 2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan sarpras kawasan pariwisata Makam Bung Karno	65%		30%	30%	100%	30%	30%	30%
3.2 6	0 2	2.0 2		Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarpras kawasan pariwisata Makam Bung Karno yang di kelola	15 kawasan		3 obyek	3 obyek	100%	3 kawasan	3 kawasan	20%
3.2 6	0 2	2.0 2	0 3	Sub Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	15 kawasan					3 kawasan	3 kawasan	20%
3.2 6	0 2	2.0 2	0 4	Sub Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	12 unit					3 unit	3 unit	25%
3.2 6	0 2	2.0 3		Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata yang terkelola dengan baik	5 destinasi		1 destinasi	1 destinasi	100%	1 destinasi	1 destinasi	20%

3.2 6	0 2	2.0 3	0 3	Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	9 destinasi					1 destinasi	1 destinasi	11%
3.2 6	0 2	2.0 3	0 4	Sub Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	7 unit					1 Unit	1 unit	14%
3.2 6	0 2	2.0 3	0 6	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	8 orang					2 laporan	2 laporan	25%
3.2 6	0 2	2.0 4		Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaku usaha yang terdaftar	5 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	20%
3.2 6	0 2	2.0 4	0 4	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	4 laporan					1 laporan	1 laporan	25%
3.2 6	0 3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase destinasi pariwisata baru yang sudah dikunjungi oleh	0,13%		0,04%	0,04%	100%	0,06%	0,06%	0,06%

					wisatawan								
3.2 6	0 3	2.0 1		Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi pariwisata yang dilakukan	50 media		9 media	9 media	100%	10 media	10 media	20%
3.2 6	0 3	2.0 1	0 1	Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	18 dokumen					4 dokumen	4 dokumen	22%
3.2 6	0 3	2.0 1	0 2	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	15 laporan					3 laporan	3 laporan	20%
3.2 6	0 3	2.0 1	0 3	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	10 dokumen					2 dokumen	2 dokumen	20%
3.2 6	0 3	2.0 1	0 4	Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	7 lokasi					1 dokumen	1 dokumen	14%
3.2 6	0 5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	Persentase pelaku ekraf yang aktif dalam	4,50%		3,00%	3,00%	100%	3,30%	3,30%	3,30%

				PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	kegiatan								
3.2 6	0 5	2.0 1		Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelaku Ekraf Yang Ikut Kegiatan	242 orang		34 orang	34 orang	100%	39 orang	39 orang	16%
3.2 6	0 5	2.0 1	0 2	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	38 orang					9 orang	9 orang	23%
3.2 6	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 (angka)		100	100	100%	81 (angka)	85,17	101%
3.2 6	0 1	2.0 1		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.2 6	0 1	2.0 1	0 1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40 dokumen					10 dokumen	10 dokumen	25%
3.2 6	0 1	2.0 1	0 6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	28 laporan					7 laporan	7 laporan	25%

					Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
3.2 6	0 1	2.0 2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.2 6	0 1	2.0 2	0 1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	164 orang					41 orang/bulan	41 orang/bulan	25%
3.2 6	0 1	2.0 2	0 7	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8 laporan					2 Laporan	2 laporan	25%
3.2 6	0 1	2.0 5		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.2 6	0 1	2.0 5	0 2	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	176 paket					44 paket	44 paket	25%

				Kelengkapannya	Kelengkapan								
3.2 6	0 1	2.0 5	1 0	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	41 orang					41 orang	41 orang	100%
3.2 6	0 1	2.0 6		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.2 6	0 1	2.0 6	0 1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	112 paket					28 paket	28 paket	25%
3.2 6	0 1	2.0 6	0 2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	16 paket					4 paket	4 paket	25%
3.2 6	0 1	2.0 6	0 3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	43 paket					43 paket	43 paket	100%
3.2 6	0 1	2.0 6	0 4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.140 paket					428 paket	428 paket	25%
3.2 6	0 1	2.0 6	0 5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	28 paket					7 paket	7 paket	25%
3.2 6	0 1	2.0 6	0 6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	240 paket					60 paket	60 paket	25%

					Disediakan								
3.2 6	0 1	2.0 6	0 7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	248 laporan					62 laporan	62 laporan	25%
3.2 6	0 1	2.0 6	1 0	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	25%
3.2 6	0 1	2.0 7		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	NA		NA	NA	0%	100%	100%	100%
3.2 6	0 1	2.0 7	0 6	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	NA		NA	NA	0%	3 unit	3 unit	100%
3.2 6	0 1	2.0 7	1 1	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	NA		NA	NA	0%	3 unit	3 unit	100%
3.2 6	0 1	2.0 8		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.2 6	0 1	2.0 8	0 2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	48 laporan					12 laporan	12 laporan	25%

					Disediakan									
3.2 6	0 1	2.0 8	0 4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	300 laporan						75 laporan	75 laporan	25%
3.2 6	0 1	2.0 9		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.2 6	0 1	2.0 9	0 2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56 unit						14 unit	14 unit	25%
3.2 6	0 1	2.0 9	0 6	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit						5 unit	5 unit	25%
3.2 6	0 1	2.0 9	0 9	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	8 unit						2 unit	2 unit	25%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2024 dapat dikatakan berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Hal tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel 2.2. sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK/ IKU	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun (2023)	Tahun (2024)	Tahun (2025)	Tahun (2022)	Tahun (2023)	Tahun (2024)	Tahun (2025)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	IKK											
1	Terlestarikannya cagar budaya		IKK	35.29	38.24	41.18	44.12	35.29	38.24	41.18	44.12	
2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan		IKK	0.06	0.12	0.18	0.26	0.06	0.12	0.18	0.26	
3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kota Blitar		IKK	9.20	9.26	9.36	9.47	9.20	9.26	9.36	9.47	
4	Tingkat hunian akomodasi		IKK	87.10	87.21	87.33	87.47	87.10	87.21	87.33	87.47	
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku		IKK	0.75	1	1.25	1.50	0.75	1	1.25	1.50	
6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD		IKK	1,4	1,8	1,9	2,0	1,4	1,8	1,9	2,0	
	IKU											
1	Persentase Kelompok Seni Budaya yang Aktif (IKU)		IKU	60%	65%	70%	75%	70%	70%	70%	75%	
2	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kota Blitar (IKU)		IKU	9,24%	9,30%	9,40%	9,52%	6,99%	6,99%	9,40%	9,52%	
3	Persentase meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi kreatif (IKU)		IKU	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,24%	0,24%	0,12%	0,12%	
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			A(83,60)	A(83,70)	A(83,75)	A(83,80)	A(85,14)	A(85,14)	A(83,75)	A(83,80)	

Berdasarkan tabel 2.2 dapat diketahui bahwa :

1. Indikator Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kota Blitar yang ditindaklanjuti tidak sesuai target.
2. Indikator Persentase meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi kreatif yang ditindaklanjuti melebihi dari target.
3. Indikator Persentase Kelompok Seni Budaya yang aktif juga tercapai.

Untuk itu Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar akan terus berupaya untuk mempertahankan bahkan untuk lebih baik lagi dengan :

1. Mengoptimalkan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan stakeholder dalam proses pemulihan ekonomi dan sektor pariwisata;
2. Meningkatkan fungsi pengendalian program dan kegiatan pembangunan dalam mengoptimalkan pencapaian target;
3. Melakukan upaya peningkatan kompetensi SDM aparatur perencanaan agar lebih efektif dalam mengawal perencanaan dan pengendalian atas pelaksanaan rencana.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar

Kondisi lokal menjadi basic dari sebuah kondisi yang akan berkembang menjadi isu-isu strategis. Karena pada dasarnya kondisi lokal adalah situasi senyatanya yang perlu mendapat perhatian dan penanganan secara seksama. Oleh karena itu, memilah dan memilih kondisi lokal dalam identifikasi masalah menjadi sangat strategis. Adapun kondisi di Kota Blitar yang berkaitan dengan urusan Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pariwisata
 - a. Belum optimalnya pengembangan Istana Gebang dan Kawasan PETA;
 - b. Belum optimalnya pengelolaan Agrowisata Belimbing Karang Sari sehingga belum dapat menjadi destinasi unggulan;
 - c. Potensi Ekonomi Kreatif yang sudah berkembang masih belum terkendali karena minimnya pembinaan;
 - d. Kurangnya sarana dan prasarana didalam penanganan destinasi pariwisata;
 - e. Kurang optimalnya promosi dan publikasi terkait destinasi pariwisata baik ke dalam maupun ke luar daerah;
 - f. Belum optimalnya kerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar didalam penanganan pemaketan wisata yang ada di Blitar;
 - g. Minimnya destinasi wisata yang mampu mengikuti dinamika kepariwisataan;
 - h. Minimnya SDM dan usaha pariwisata & ekonomi kreatif yang bersertifikasi.
2. Urusan Kebudayaan
 - a. Belum optimalnya pembinaan kesenian modern, masih cenderung pada kesenian tradisional. Kesenian modern juga harus dikembangkan dalam rangka memperkaya khasanah kesenian tradisional dan modern;
 - b. Masih kurangnya sarana dan prasarana terkait dengan ruang pameran dan ruang berekspresi bagi kesenian dan kebudayaan;
 - c. Masih belum adanya penanda kesenian atau kebudayaan yang bersifat khas dari Kota Blitar;

- d. Masih kurangnya sarana dan prasarana didalam pemeliharaan penemuan yang diduga cagar budaya (Candi Gedog dan penemuan di Karangtengah yang disebut Jambangan Air);
- e. Masih kurangnya perhatian terhadap cagar budaya dan bangunan/barang yang diduga cagar budaya.

Adapun Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. Pemajuan Kebudayaan yang belum optimal
Keterbatasan SDM Seni dan Budaya masih kurang serta inovasi kebudayaan yang belum terdorong sehingga obyek-obyek kebudayaan belum ditangani dengan baik.
2. Belum adanya pelestarian cagar budaya
Belum adanya perhatian pemerintah pada Cagar Budaya dan Obyek diduga Benda Cagar Budaya (OBCB) yaitu belum adanya kebijakan daerah berkaitan dengan pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya.
3. Destinasi Pariwisata yang kurang variatif
 - ❖ Minimnya pengetahuan masyarakat tentang destinasi wisata di Kota Blitar mengakibatkan belum optimalnya pengelolaan potensi Pariwisata.
 - ❖ Kurang maksimalnya pemasaran pariwisata dikarenakan minimnya biaya pemasaran.
4. Kegiatan Ekonomi Kreatif belum berjalan maksimal
Belum adanya sinergitas antar Perangkat Daerah dalam menangani ekonomi kreatif sehingga belum optimalnya pembinaan dan pelatihan pelaku Ekonomi Kreatif

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 telah menentukan 6 (enam) Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu : 1). Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia; 2). Pemulihan ekonomi melalui perdagangan dan jasa, pariwisata, serta ekonomi kreatif berbasis digital; 3). Peningkatan kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan; 4). Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, berorientasi masyarakat, dan berbasis teknologi informasi; 5). Peningkatan nilai-nilai religius, nasionalis, setara gender, berbudaya, kondusif, dan demokratis; dan 6). Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup untuk mendukung pengembangan ekonomi, pelayanan dasar, dan ketahanan bencana.

Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata dilaksanakan penyesuaian sebagaimana dalam tabel dibawah :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB					
	BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN					BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN					
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kota Blitar	Persentase budaya lokal yang dikembangkan	85%	499.771.900	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kota Blitar	Persentase budaya lokal yang dikembangkan	85%	499.771.900	
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1 objek	284.202.800	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1 objek	284.202.800	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kota Blitar	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1 objek	149.257.500	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kota Blitar	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1 objek	149.257.500	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kota Blitar	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata	8 orang	134.945.300	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kota Blitar	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata	8 orang	134.945.300	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Kebudayaan					Kebudayaan			
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan , Pemanfaatan	1 objek	215.569.100	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan , Pemanfaatan	1 objek	215.569.100	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kota Blitar	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	10 laporan	215.569.100	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kota Blitar	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	10 laporan	215.569.100	
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Kota Blitar	Persentase kesejarahan yang dikembangkan	90%	588.993.600	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Kota Blitar	Persentase kesejarahan yang dikembangkan	90%	588.993.600	
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	6 event	588.993.600	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	6 event	588.993.600	
	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	6 event	424.392.600	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	6 event	424.392.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Kota Blitar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	1 jenis	164.601.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Kota Blitar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	1 jenis	164.601.000	
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Kota Blitar	Persentase Cagar Budaya yang dikembangkan	70%	134.826.000	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Kota Blitar	Persentase Cagar Budaya yang dikembangkan	70%	134.826.000	
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	1 objek	134.826.000	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	1 objek	134.826.000	
	Pelindungan Cagar Budaya	Kota Blitar	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	1 objek	134.826.000	Pelindungan Cagar Budaya	Kota Blitar	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	1 objek	134.826.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Kota Blitar				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Kota Blitar				
	BIDANG URUSAN PARIWISATA	Kota Blitar				BIDANG URUSAN PARIWISATA	Kota Blitar				
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kota Blitar	Persentase obyek pariwisata baru yang dikembangkan	50%	2.740.736.878	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kota Blitar	Persentase obyek pariwisata baru yang dikembangkan	50%	2.740.736.878	
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	2 lokasi	1.687.454.978	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	2 lokasi	1.687.454.978	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	2 lokasi	1.687.454.978	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	2 lokasi	1.687.454.978	
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3 lokasi	600.194.100	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3 lokasi	600.194.100	
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3 unit	200.194.300	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3 unit	200.194.300	
	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan	Kota Blitar	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata	3 lokasi	399.999.800	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam	Kota Blitar	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata	3 lokasi	399.999.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota			Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kot a			
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	2 laporan	453.087.800	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kot a	2 laporan	453.087.800	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	2 laporan	453.087.800	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kot a	2 laporan	453.087.800	
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kota Blitar	Persentase destinasi pariwisata baru yang sudah dikunjungi oleh wisatawan	0,08%	344.721.500	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kota Blitar	Persentase destinasi pariwisata baru yang sudah dikunjungi oleh wisatawan	0,08%	344.721.500	
	Pemasaran	Kota	Jumlah	2 dokumen	344.721.500	Pemasaran	Kota	Jumlah	2 dokumen	344.721.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Blitar	Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri			Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Blitar	Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri			
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2 dokumen	3.021.500	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2 dokumen	3.021.500	
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3 kegiatan	248.716.900	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3 kegiatan	248.716.900	
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	4 promosi	92.983.100	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	4 promosi	92.983.100	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN	Kota Blitar	Persentase pelaku ekraf yang aktif dalam kegiatan	3,90 %	90.738.400	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN	Kota Blitar	Persentase pelaku ekraf yang aktif dalam kegiatan	3,90 %	90.738.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	EKONOMI KREATIF					EKONOMI KREATIF					
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Blitar	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	40 orang	90.738.400	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Blitar	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	40 orang	90.738.400	
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kota Blitar	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	40 orang	30.738.400	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kota Blitar	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	40 orang	30.738.400	
	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Kota Blitar	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	9 orang	60.000.000	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Kota Blitar	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	9 orang	60.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Blitar	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 (angka)	8.273.398.383	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	Kota Blitar	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 (angka)	8.273.398.383	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	16.162.800	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	16.162.800	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	4.999.800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	4.999.800	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 laporan	11.163.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 laporan	11.163.000	
	Administrasi Keuangan	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Menerima	41 orang/ bulan	4.488.306.559	Administrasi Keuangan	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Menerima	41 orang/ bulan	4.488.306.559	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perangkat Daerah		Gaji dan Tunjangan ASN			Perangkat Daerah		Gaji dan Tunjangan ASN			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 orang/ bulan	4.487.021.359	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 orang/ bulan	4.487.021.359	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 laporan	1.285.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 laporan	1.285.200	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	44 paket	127.123.050	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	44 paket	127.123.050	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	44 paket	58.760.200	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	44 paket	58.760.200	
	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	41 orang	68.362.850	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	41 orang	68.362.850	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Undangan					Undangan			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	28 paket	366.809.850	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	28 paket	366.809.850	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	28 paket	34.351.700	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	28 paket	34.351.700	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	30.002.100	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	30.002.100	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	43 paket	24.929.550	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	43 paket	24.929.550	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	428 paket	49.998.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	428 paket	49.998.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Blitar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	7 paket	14.664.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Blitar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	7 paket	14.664.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			yang Disediakan					yang Disediakan			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 paket	9.540.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 paket	9.540.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62 laporan	190.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62 laporan	190.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	13.324.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	13.324.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	99.643.024	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	99.643.024	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	84.643.024	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	84.643.024	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Kota Blitar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	1 unit	15.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	Kota Blitar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	1 unit	15.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	atau Bangunan Lainnya		Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Kantor atau Bangunan Lainnya		Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	2.999.790.200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	2.999.790.20 0	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	319.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	319.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	75 laporan	2.680.790.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	75 laporan	2.680.790.20 0	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	14 unit	175.562.900	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	14 unit	175.562.900	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 unit	82.242.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 unit	82.242.400	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	73.320.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	73.320.500	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	20.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	20.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dalam perencanaan kerja juga memperhatikan hasil dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) sebagaimana dalam tabel terlampir

Tabel 2.4.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024
Kota Blitar

No	Usulan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Volume	Catatan
1	Pembinaan dan kajian kampung kreatif	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kelurahan Tlumpu	Persentase obyek pariwisata baru yang dikembangkan	50.000.000	50 orang	Tidak Diakomodir
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota			
		Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota		Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota			
2	Pelatihan Memandu Wisata Sejarah	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	RW 05 Kelurahan Kepanjenlor	Persentase obyek pariwisata baru yang dikembangkan	30.000.000	30 orang	Tidak Diakomodir
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
3	Fasilitasi kepemimpinan jaranan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kelompok Kesenian di Kelurahan Blitar	Persentase budaya lokal yang dikembangkan	80.000.000	8 grup	Tidak Diakomodir
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan			

		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional			
4	Pelatihan Menari, Memainkan Gamelan, Dan Seni Musik	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	RW 03 Kelurahan Turi	Persentase budaya lokal yang dikembangkan	10.000.000	30 Orang	Tidak Diakomodir
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan			
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional			
5	Selamatan Bedah Sumber Mbah Jati	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Bendo, Kepanjenkidul, Ngadirejo, Tanggung	Persentase kesejarahan yang dikembangkan	100.000.000	4 Lokasi	Tidak Diakomodir
		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan			
		Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan			
6	Pelatihan Seni Jaranan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kepanjenkidul, Kepanjenkidul, Ngadirejo	Persentase budaya lokal yang dikembangkan	70.000.000	70 orang	Tidak Diakomodir
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan			
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional			

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024, disebutkan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, dengan sasaran :
 - Meningkatkan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
 - Meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian;
 - Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
 - Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
 - Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
 - Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi;
 - Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi disektor riil, dan industrialisasi;
 - Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); dan
 - Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan dengan sasaran :
 - Pembangunan Wilayah Sumatera;
 - Pembangunan Wilayah Jawa-Bali;
 - Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;
 - Pembangunan Wilayah Kalimantan;
 - Pembangunan Wilayah Sulawesi;
 - Pembangunan Wilayah Maluku; dan
 - Pembangunan Wilayah Papua.
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran :
 - Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan;
 - Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk;
 - Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan;
 - Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - Meningkatnya asset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan;
 - Meningkatnya produktifitas dan daya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan sasaran :
 - Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
 - Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;

- Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
 - Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
 - Meningkatkan ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa; dan
 - Meningkatkan budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dengan sasaran :
- Meningkatkan penyediaan infrastruktur layanan dasar;
 - Meningkatkan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
 - Meningkatkan layanan infrastruktur perkotaan;
 - Meningkatkan layanan energy dan ketenaga listrikan; dan
 - Meningkatkan layanan infrastruktur TIK.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan sasaran :
- Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim; dan
 - Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline.
7. Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik dengan sasaran :
- Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga Negara secara optimal;
 - Optimalnya kebijakan luar negeri;
 - Meningkatkan penegakan hukum nasional yang mantap;
 - Meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan
 - Terjaganya stabilitas keamanan nasional.

Strategi dan kebijakan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Disbudpar yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan arah kebijakan jangka menengah dan target kinerja hasil (Outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar. Strategi dan Kebijakan dalam Renstra Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar bagi setiap program.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk mencapai dan melaksanakannya

dalam tahun tertentu. Sehingga ditentukan indikator Kinerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar berdasarkan kelompok sasaran sebagaimana tabel terlampir :

- Tujuan: 1.Meningkatkanya Pemajuan Kebudayaan dan Kelestarian Cagar Budaya
2.Menguatnya predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Tabel 3.1.
Sasaran Renja Perangkat Daerah
Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target	
			2022		2023	2024
1.	Meningkatnya Kualitas kegiatan Seni Budaya	Persentase Kelompok Seni Budaya yang Aktif (IKU)	60%	70%	65%	70%
2.	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan di Kota Blitar	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kota Blitar (IKU)	9,24%	6,99%	9,30%	9,40%
	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi Kreatif	Persentase meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi kreatif (IKU)	0,12%	0,24%	0,12%	0,12%
3.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A(83,60)	A(85,14)	A(83,70)	A(83,75)

Tabel 3.2
Tujuan Renja Perangkat Daerah
Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target	
			2022		2023	2024
1.	Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan dan Kelestarian Cagar Budaya	Persentase peningkatan kelestarian warisan budaya lokal	0,99%	1,24%	1,49%	1,98%
2.	Menguatnya predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pertumbuhan PDRB kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,75%	9,08%	1,00%	1,25%
		Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif	1,50%	2,55%	1,60%	1,70%
3.	Meningkatnya tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A(83,60)	A(85,14)	A(83,70)	A(83,75)

3.3 Program dan Kegiatan

Tabel 3.3.
Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	17
		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
1.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	<i>Persentase budaya lokal yang dikembangkan</i>	
	2.22.02.2.0 1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah pengelolaan kebudayaan yang terfasilitasi</i>	Mendukung pencapaian Tupoksi
	2.22.02.2.0 1.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		
			<i>Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan</i>	
	2.22.02.2.0 1.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		
			<i>Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan</i>	
	2.22.02.2.0 2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah pelestarian kesenian tradisional yang terfasilitasi</i>	Mendukung pencapaian Tupoksi
	2.22.02.2.0 2.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		
			<i>Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional</i>	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	17
2.	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	<i>Persentase kesejarahan yang dikembangkan</i>	
	2.22.04.2.0 1	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah pembinaan event sejarah yang terfasilitasi</i>	Mendukung pencapaian Tupoksi
	2.22.04.2.0 1.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota		
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan</i>	
	2.22.04.2.0 1.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah</i>	
3.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	<i>Persentase Cagar Budaya yang dikembangkan</i>	
	2.22.05.2.0 2	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	<i>Jumlah cagar budaya yang dikelola</i>	Mendukung pencapaian Tupoksi
	2.22.05.2.0 2.0001	Pelindungan Cagar Budaya		
			<i>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi</i>	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
1.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</i>	
	3.26.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar</i>	Mendukung pencapaian Tupoksi
	3.26.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	17
	3.26.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	
	3.26.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar</i>	Mendukung pencapaian Tupoksi
	3.26.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	
	3.26.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD</i>	
	3.26.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar</i>	Mendukung pencapaian Tupoksi
	3.26.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	
	3.26.01.2.0 5.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-</i>	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	17
			<i>Undangan</i>	
	3.26.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar</i>	Mendukung pencapaian Tupoksi
	3.26.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	
	3.26.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	
	3.26.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	
	3.26.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	
	3.26.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	
	3.26.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan</i>	
	3.26.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	
	3.26.01.2.0 6.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	
	3.26.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase BMD yang tersedia sesuai standart</i>	Mendukung pencapaian Tupoksi
	3.26.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	
	3.26.01.2.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	
	3.26.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar</i>	Mendukung pencapaian Tupoksi
	3.26.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	
	3.26.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	
	3.26.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart</i>	Mendukung pencapaian Tupoksi
	3.26.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	17
	3.26.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	
	3.26.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	
2.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	<i>Persentase obyek pariwisata baru yang dikembangkan</i>	
	3.26.02.2.0 1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	<i>Jumlah destinasi pariwisata yang terkelola dengan baik</i>	Mendukung pencapaian Tupoksi
	3.26.02.2.0 1.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota		
			<i>Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota</i>	
	3.26.02.2.0 2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	<i>Jumlah sarpras kawasan pariwisata Makam Bung Karno yang dikelola</i>	Mendukung pencapaian Tupoksi
	3.26.02.2.0 2.0004	Pengadaan/Pemelihara an/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	
	3.26.02.2.0 2.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		
			<i>Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan</i>	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	17
			<i>Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	
	3.26.02.2.0 3	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah destinasi pariwisata yang terkelola dengan baik	Mendukung pencapaian Tupoksi
	3.26.02.2.0 3.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	
3.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	<i>Persentase destinasi pariwisata baru yang sudah dikunjungi oleh wisatawan</i>	
	3.26.03.2.0 1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah media promosi pariwisata yang dilakukan</i>	Mendukung pencapaian Tupoksi
	3.26.03.2.0 1.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		
			<i>Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri</i>	
	3.26.03.2.0 1.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota		
			<i>Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri</i>	
	3.26.03.2.0 1.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik</i>	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	17
			<i>Dalam dan Luar Negeri</i>	
4.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	<i>Persentase pelaku ekraf yang aktif dalam kegiatan</i>	
	3.26.05.2.0 1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	<i>Jumlah Pelaku Ekraf Yang Ikut Kegiatan</i>	Mendukung pencapaian Tupoksi
	3.26.05.2.0 1.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		
			<i>Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif</i>	
	3.26.05.2.0 1.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata		
			<i>Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata</i>	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Kota Blitar serta untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Selain itu, perumusan program kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar tahun 2024 juga mengacu pada langkah perbaikan LKjIP sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1.
Rencana Tindak Lanjut LKjIP Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Tahun 2022
Pada Renja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun 2024

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Mengoptimalkan peningkatan pembinaan terhadap kelompok seni budaya yang ada, dengan memberikan tempat untuk berkreasi mengembangkan jati diri	Secara berkala melaksanakan pembinaan terhadap kelompok seni budaya yang ada, dengan memberikan tempat untuk berkreasi mengembangkan jati diri	Program : Pengembangan Kebudayaan Kegiatan : ~ Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota ~ Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : ~ Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan ~ Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
2	Peningkatan nilai, tradisi, dan warisan kekayaan budaya	Secara berkala melaksanakan tradisi budaya	Program : Pembinaan Sejarah Kegiatan : Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota
3	Optimalisasi pengembangan kawasan pariwisata baik yang sudah ada maupun kawasan baru	Secara berkala melaksanakan pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata	Program : Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : ~ Penerapan Destinasi Pariwisata

			Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota ~ Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
4	Pengembangan kompetensi untuk insan pariwisata	Melaksanakan pelatihan kepariwisataan	Program : Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
5	Mengoptimalkan pembinaan dan pelatihan ekonomi kreatif	Melaksanakan pelatihan ekonomi kreatif	Program : Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
6	Mengoptimalkan pengelolaan data pelaku ekonomi kreatif	Melaksanakan sinergitas ekonomi kreatif	Program : Pemasaran Pariwisata Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
7	~ Melaksanakan pengelolaan promosi dan paket pariwisata dengan optimal ~ Pemasaran pariwisata berbasis digital	~ Melaksanakan pemasaran promosi paket-paket pariwisata	Program : Pemasaran Pariwisata Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

Jumlah program yang diusulkan untuk dilaksanakan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar tahun 2024 adalah 7 program, 16 kegiatan dan 36 sub kegiatan. Selanjutnya, program dan kegiatan–kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.2.
Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kota Blitar

Nama PD : Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			12.673.186.6 61,00					14.322.373. 993,50	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.223.591.50 0,00					1.676.347.5 55,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			1.223.591.50 0,00					1.676.347.5 55,00	
1,	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	<i>Persentase budaya lokal yang dikembangkan</i>	85 %	499.771.900, 00				-	676.347.555 ,00	
	2.22.02.2. 01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah pengelolaan kebudayaan yang terfasilitasi</i>	9 Kelompok	284.202.800, 00			Kelompok insan budaya	-	450.000.000 ,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
	2.22.02.2. 01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan									
			<i>Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan</i>	1 Objek	149.257.500, 00	Kota Blitar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kelompok insan budaya		200.000.000 ,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2. 01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan									
			<i>Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan</i>	8 Orang	134.945.300, 00	Kota Blitar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kelompok insan budaya		250.000.000 ,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2. 02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah pelestarian kesenian tradisional yang terfasilitasi</i>	10 event	215.569.100, 00			Kelompok insan budaya	-	226.347.555 ,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2. 02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional									

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	10 Laporan	215.569.100, 00	Kota Blitar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kelompok insan budaya		226.347.555 ,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2,	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase kesejarahan yang dikembangkan	90 %	588.993.600, 00				-	750.000.000 ,00	
	2.22.04.2. 01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan event sejarah yang terfasilitasi	7 event	588.993.600, 00			Kelompok pelaku sejarah dan insan budaya	-	750.000.000 ,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.04.2. 01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota									
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	6 event Orang	424.392.600, 00	Kota Blitar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kelompok pelaku sejarah dan insan budaya		500.000.000 ,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.04.2. 01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah									

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah</i>	1 jenis Unit	164.601.000, 00	Kota Blitar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kelompok pelaku sejarah dan insan budaya		250.000.000 ,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3,	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	<i>Persentase Cagar Budaya yang dikembangkan</i>	70 %	134.826.000, 00				-	250.000.000 ,00	
	2.22.05.2. 02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	<i>Jumlah cagar budaya yang dikelola</i>	1 obyek	134.826.000, 00			Obyek cagar budaya	-	250.000.000 ,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2. 02.0001	Pelindungan Cagar Budaya									
			<i>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi</i>	1 Objek	134.826.000, 00	Kota Blitar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Obyek cagar budaya		250.000.000 ,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			11.449.595.1 61,00					12.646.026. 438,50	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			11.449.595.1 61,00					12.646.026. 438,50	
1,	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</i>	82 angka	8.273.398.38 3,00				-	8.684.880.2 33,50	
	3.26.01.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar</i>	100 %	16.162.800,0 0			perencana an dan pelaporan	-	16.970.940, 00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2. 01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	10 Dokumen	4.999.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	perencana an dan pelaporan		5.249.790,0 0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2. 01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi</i>	7 Laporan	11.163.000,0 0	Kota Blitar, Semua Kecamat an, Semua	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	perencana an dan pelaporan		11.721.150, 00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
			<i>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>			Kel/Desa					
	3.26.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar</i>	100 %	4.488.306.55 9,00			ASN	-	4.712.131.2 61,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2. 02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	41 Orang/bulan	4.487.021.35 9,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	ASN		4.710.781.8 01,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2. 02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	2 Laporan	1.285.200,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	ASN		1.349.460,0 0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
	3.26.01.2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar</i>	100 %	127.123.050, 00			Layanan kepegawai an	-	133.477.402 ,50	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2. 05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	44 Paket	58.760.200,0 0	Kota Blitar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Layanan kepegawai an		61.698.210, 00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2. 05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan</i>	41 Orang	68.362.850,0 0	Kota Blitar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Layanan kepegawai an		71.779.192, 50	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar</i>	100 %	366.809.850, 00			ASN	-	383.554.700 ,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2. 06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	28 Paket	34.351.700,0 0	Kota Blitar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	ASN		36.750.000, 00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2. 06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	30.002.100,0 0	Kota Blitar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	ASN		31.500.000, 00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2. 06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	43 Paket	24.929.550,0 0	Kota Blitar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	ASN		26.250.000, 00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2. 06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	428 Paket	49.998.000,0 0	Kota Blitar, Semua Kecamat an,	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI	ASN		50.150.000, 00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
						Semua Kel/Desa	UMUM				
	3.26.01.2. 06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	7 Paket	14.664.500,0 0	Kota Blitar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	ASN		15.397.500, 00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2. 06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan</i>	60 paket Dokumen	9.540.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	ASN		10.017.000, 00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2. 06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	62 Laporan	190.000.000, 00	Kota Blitar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	ASN		199.500.000 ,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2. 06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
			<i>Jumlah Dokumen</i>	1 Dokumen	13.324.000,0	Kota	DANA	ASN		13.990.200,	DINAS

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
			<i>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>		0	Blitar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM			00	KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase BMD yang tersedia sesuai standart</i>	100 %	99.643.024,0 0			ASN dan PTT	-	104.625.175 ,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2. 07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	6 Unit	84.643.024,0 0	Kota Blitar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	ASN dan PTT		88.875.175, 00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2. 07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit	15.000.000,0 0	Kota Blitar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	ASN dan PTT		15.750.000, 00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar</i>	10 0 %	2.999.790.20 0,00			TLD	-	3.149.779.7 10,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
	3.26.01.2. 08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	319.000.000, 00	Kota Blitar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	TLD		334.950.000 ,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2. 08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	75 Laporan	2.680.790.20 0,00	Kota Blitar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	TLD		2.814.829.7 10,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart</i>	100 %	175.562.900, 00			ASN dan PTT	-	184.341.045 ,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2. 09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	14 Unit	82.242.400,0 0	Kota Blitar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	ASN dan PTT		86.354.520, 00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2. 09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	5 Unit	73.320.500,0 0	Kota Blitar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	ASN dan PTT		76.986.525, 00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2. 09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhab ilitasi</i>	2 Unit	20.000.000,0 0	Kota Blitar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	ASN dan PTT		21.000.000, 00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2,	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	<i>Persentase obyek pariwisata baru yang dikembangkan</i>	50 %	2.740.736.87 8,00				-	3.505.946.2 05,00	
	3.26.02.2. 01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	<i>Jumlah destinasi pariwisata yang terkelola dengan baik</i>	1 destinasi	1.687.454.97 8,00			Destinasi pariwisata	-	2.400.000.0 00,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2. 01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota									
			<i>Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota</i>	2 Lokasi	1.687.454.97 8,00	Kota Blitar, Semua Kecamat an,	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI	Destinasi pariwisata		2.400.000.0 00,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
						Semua Kel/Desa	UMUM				
	3.26.02.2. 02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	<i>Jumlah sarpras kawasan pariwisata Makam Bung Karno yang dikelola</i>	3 kawasan	600.194.100, 00			Destinasi pariwisata	-	630.204.015 ,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2. 02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota									
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	3 Unit	200.194.300, 00	Kota Blitar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Destinasi pariwisata		210.204.015 ,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2. 02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota									
			<i>Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	3 Lokasi	399.999.800, 00	Kota Blitar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Destinasi pariwisata		420.000.000 ,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2. 03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata	1 destinasi	453.087.800, 00			-	-	475.742.190 ,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
			yang terkelola dengan baik								PARIWISATA
	3.26.02.2. 03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	2 Laporan	453.087.800, 00	Kota Blitar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-		475.742.190 ,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3,	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	<i>Persentase destinasi pariwisata baru yang sudah dikunjungi oleh wisatawan</i>	0,08 %	344.721.500, 00				-	360.200.000 ,00	
	3.26.03.2. 01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	<i>Jumlah media promosi pariwisata yang dilakukan</i>	11 media	344.721.500, 00			Promosi pariwisata	-	360.200.000 ,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.03.2. 01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri									

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri</i>	2 Dokumen	3.021.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Promosi pariwisata		3.200.000,0 0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.03.2. 01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota									
			<i>Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri</i>	3 Kegiatan	248.716.900, 00	Kota Blitar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Promosi pariwisata		260.000.000 ,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.03.2. 01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri									
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri</i>	4 Promosi	92.983.100,0 0	Kota Blitar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI	Promosi pariwisata		97.000.000, 00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

[illegible]

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
			<i>Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata</i>	9 Orang	60.000.000,0 0	Kota Blitar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kelompok insan pariwisata dan ekonomi kreatif		63.000.000, 00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	J U M L A H				12.673.186.6 61,00					14.322.373. 993,50	

BAB V PENUTUP

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata tahun 2024 sebagai penjabaran Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2024. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2023.

1.1. Catatan penting dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tahapan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2024. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat daerah.

1.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2024 sesuai tugas dan kewenangannya dan menjaga keselarasan antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Guna efektivitas dan efisiensi dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaannya
3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

1.3. Rencana Tindak lanjut

Dalam menghadapi tugas perencanaan yang semakin kompleks, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar memerlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

- a. Dalam rangka sinergitas perencanaan untuk mewujudkan Indikator Kinerja Utama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja, koordinasi

dengan perangkat daerah harus dilaksanakan lebih intensif, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.

- b. Meningkatkan peran serta masyarakat, dalam proses perencanaan, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
- c. Peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan dalam rangka melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya peningkatan dapat dilakukan melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencanaan
- d. Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar tahun 2024. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh aparatur Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang.